

BAB II

KAPITALISASI INDUSTRI PERFILMAN DAN GERAKAN FEMINISME DI INDONESIA

Pada bab ini, akan dibahas mengenai kapitalisasi industri perfilman serta gerakan feminisme yang selama ini telah diperjuangkan oleh perempuan di Indonesia. Pembahasan ini tidak luput dari *historical situatedness* yang digunakan untuk melihat bagaimana peneliti mengamati dan menelaah industri perfilman dan gerakan feminisme pada konteks sejarah, sosial budaya, ekonomi, dan politik sehingga kemudian dapat menunjukkan kaitannya dengan topik pada penelitian ini.

2.1 Industrialisasi Perfilman di Indonesia

Industri perfilman telah lama berkiprah di Indonesia. Sejak sekitar abad ke-20 di zaman Hindia Belanda, film hadir di negeri ini dengan sebutan gambar idoeop atau biasa juga disebut sebagai film bisu. Film bisu merupakan film yang tidak bersuara sehingga penonton hanya dapat melihat visualnya saja dengan warna hitam putih (Azahra, 2020). Dengan kondisi teknologi seperti ini, para pemain film lebih menonjolkan ekspresi wajah maupun gerakan tubuhnya untuk menunjukkan maksud yang ingin disampaikan kepada penonton.

Produksi film pada masa itu masih diproduksi oleh orang asing dengan film dokumenter yang kebanyakan menceritakan tentang alam atau kehidupan masyarakat Barat, khususnya orang Belanda (Azahra, 2020). Film-film yang menceritakan kehidupan masyarakat Barat sengaja dibuat dengan tujuan untuk memperlihatkan rakyat Indonesia bagaimana orang Barat menjalankan hidupnya. Pemutaran film di Indonesia (kala itu masih menjadi Hindia Belanda) pertama kali dipamerkan pada tanggal 5 Desember 1900 di Tanah Abang, Batavia. Film yang ditayangkan adalah sebuah film dokumenter dengan kisah perjalanan Ratu Belanda dan Pangeran Hertog Hendrick di ibukota Belanda, Den Haag (Ardiyanti, 2017).

Pada tahun 1926, film Indonesia berjudul “Loetoeng Kasaroeng” pun hadir. Film ini disutradarai oleh G. Kruger yang merupakan keturunan Jawa-Belanda dan dibantu oleh orang Belanda bernama L. Heuveldorp beserta pemainnya yang merupakan artis lokal. Loetoeng Kasaroeng diproduksi oleh NV Java Film Company di Bandung dan dibiayai oleh Bupati Bandung, Wiranatakusuma V karena ia sangat antusias dengan kesenian dan kebudayaan Sunda (Armantono, 2016). Film ini menjadi film lokal pertama di Hindia Belanda serta menggandeng kaum pribumi sebagai para pemainnya sehingga menjadi tonggak sejarah bagi industri perfilman di Hindia Belanda.

Selanjutnya di tahun 1937, film berjudul “Terang Boelan” hadir pada masa krisis ekonomi dunia. Film Terang Boelan merupakan karya dari Albert Balink, seorang jurnalis Belanda (Ardiyanti, 2017). Film ini merupakan film pertama dengan cerita lokal yang mengisahkan tentang kehidupan kaum pribumi di Hindia Belanda sebagai fokus film. Terang Boelan pun menarik perhatian yang tinggi dari masyarakat kelas bawah. Selain karena jalan ceritanya, Terang Boelan juga memiliki terobosan baru sebagai film musikal yang menjadi jenis film baru di Indonesia.

Industri perfilman di Indonesia tentunya mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Meskipun telah terdapat beberapa film yang menggambarkan kebudayaan Indonesia maupun masyarakatnya dengan berbagai judul yang dirilis, tetapi adakalanya industri ini merosot akibat kondisi di Indonesia yang belum stabil. Penjajahan yang masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada masa itu membuat industri perfilman sering kali goyah. Industri ini terkadang melambung tinggi dengan banyak peminat, baik yang bertugas dalam pembuatannya maupun penontonnya, tetapi di waktu tertentu justru merasakan sebaliknya.

Pada sekitar tahun 1942 – 1944 saat masa penjajahan Jepang, industri perfilman di Indonesia dapat dikatakan surut. Masa penjajahan Jepang membuat pengerjaan film bagi masyarakat Indonesia dibataskan oleh para penjajah. Jepang mengambil alih

seluruh kebijakan perfilman dari Belanda dan membuat aturan baru. Industri perfilman di masa ini digunakan hanya untuk menceritakan tentang propaganda dan membanggakan negara Jepang melihat dari kekuatan dan dominasinya di Indonesia (Azahra, 2020). Meskipun begitu, kaum pribumi memanfaatkan celah saat Jepang mendirikan industri perfilman bernama Nippon Eiga Sha untuk mendorong kemampuan mereka dalam pembuatan film (Suryapati dalam Azahra, 2020).

Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai bangkit kembali dalam industri perfilman. Hal ini dapat dilihat dari dibangunnya Perusahaan Film Nasional Indonesia (Perfini) oleh Usmar Ismail pada tanggal 30 Maret 1950 yang memproduksi film *Darah & Doa* dan kemudian hari tersebut ditetapkan sebagai Hari Film Nasional (Azahra, 2020). Selanjutnya, pada tahun 1970-an, industri perfilman Indonesia terus mengalami perkembangan yang bahkan disebut sebagai periode kejayaan bagi perfilman di Indonesia. Kebangkitan ini dibuktikan dengan banyaknya film yang dibuat hingga mencapai ratusan judul pada masa tersebut (Ardiyanti, 2017). Kendati demikian, pada tahun 1990-an, industri perfilman kian merosot, salah satu alasannya karena persaingan dengan film asing yang semakin ketat sehingga banyak film yang mengangkat unsur seksualitas dan sensualitas guna menarik perhatian penonton (Azahra, 2020). Kemudian, pada tahun 1998 hingga sekarang, industri perfilman kian membaik dengan berbagai karya film yang semakin bertambah setiap tahunnya.

Industri perfilman di Indonesia dapat dikatakan mempunyai perkembangan yang “naik-turun”. Perfilman tidak selamanya mencapai puncak yang banyak diminati oleh masyarakat lantaran di waktu-waktu tertentu terdapat situasi yang kurang menjanjikan untuk mengembangkan industri ini. Terlebih jika dilihat pada awal munculnya perfilman, Indonesia masih berada di bawah jajahan negara lain; membuat masyarakat harus berjuang demi negara sehingga kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk mengerjakan suatu film. Selain itu, dalam sejarahnya, terdapat juga tantangan lain yang harus dilewati dengan banyaknya film-film asing yang menjadi saingan dengan film-film lokal. Namun, di zaman sekarang, dapat dilihat bahwa industri

perfilman telah mencapai kesuksesan yang melonjak tinggi. Saat ini, film-film Indonesia tidak lagi tertinggal dengan film-film asing karena kualitasnya yang bisa diadu. Teknologi yang semakin maju mendorong perkembangan pada produksi film, dari segi memudahkan untuk dibuat hingga memperindah visualisasinya. Pemerintah juga berupaya untuk senantiasa mendukung industri perfilman sehingga para pembuat film dapat lebih bebas dalam berekspresi. Hal tersebut dapat dilihat dari genre yang semakin bervariasi, yaitu horor, komedi, *action*, bahkan terdapat berbagai film dengan tema yang kebanyakan orang masih menganggap tabu, salah satunya isu-isu perempuan.

2.2 Kapitalisasi Perfilman di Indonesia

Sebelum membahas tentang kapitalisasi perfilman, sebaiknya perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu paham atau sistem ekonomi yang berfokus pada pengendalian sektor ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sistem ini merupakan dorongan dari nilai-nilai kebebasan agar kebutuhan yang diinginkan dapat terpenuhi (Damanuri, 2020).

Gerakan liberalisme atau pembebasan; semangat negara bangsa, merupakan cikal bakal dari sistem kapitalisme. Karya yang berjudul *The Protestant Ethic of Spirit Capitalism* oleh Max Weber mengungkapkan kaitan yang erat antara nilai-nilai Protestan atas semangat religiusnya dengan kapitalisme, yakni kedua hal tersebut berpengaruh pada perubahan nilai yang membentuk masyarakat (Huda, 2016).

Pada abad ke-16, kapitalisme muncul di Eropa dari pemikiran kaum ilmiah yang awalnya ingin menyejahterakan kaum buruh. Kapitalisme dipelopori oleh industri sandang di Inggris yang merupakan industri sandang terbesar di Eropa yang bergerak dengan pesat kala itu. Perkembangan dari kapitalisme ditandai dengan kejadian Revolusi Industri di Inggris, hingga akhirnya memunculkan Adam Smith sebagai Bapak Kapitalisme yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi sepenuhnya digerakkan

oleh sifat egois yang mementingkan diri sendiri (Arief, 2021). Kapitalisme pun berlanjut hingga peristiwa besar, yakni Perang Dunia 1, yang menggeser dominasi modal ke Amerika, perlawanan negara-negara di Asia dan Afrika, serta Revolusi Bolshevik Rusia yang berusaha menjatuhkan sistem kapitalisme (Huda, 2016).

Berbicara tentang kapitalisme, industri perfilman merupakan salah satu produk dari sistem kapitalisme. Mengingat kapitalisme adalah sebuah sistem yang dikendalikan untuk menggerakkan seluruh kegiatan ekonomi demi mencapai keuntungan semaksimal mungkin, industri perfilman tentunya ikut andil pada sistem ini. Rumah produksi film milik swasta mendorong kesuksesan industri perfilman di Indonesia untuk terus melahirkan banyak karya film. Meskipun rumah-rumah produksi tersebut membuat sebuah film yang menggambarkan keadaan sebenarnya di masyarakat, baik untuk tujuan informasi atau edukasi, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka tetap berorientasi pada profit yang didapatkan dari film-film yang dibuat.

Kapitalisasi perfilman di Indonesia dapat ditunjukkan dengan bioskop yang merajalela saat ini. Bioskop yang pertama kali dikenal oleh masyarakat pada tanggal 5 Desember 1900 telah mengalami pertumbuhan yang sangat baik hingga sekarang. Antusias masyarakat Indonesia yang tinggi terhadap industri perfilman mewujudkan dibangunnya bioskop terbesar pada tahun 1951 yang sekarang disebut Metropole. Kemudian, bioskop pun berkembang pada tahun 1987 saat PT Subentra Twenty One didirikan oleh Sudwikatmono dan Benny Suharman hingga dibangun Studio 21 pertama pada tahun yang sama (Ardiyanti, 2017). Saat ini, Badan Perfilman Indonesia melalui *ANTARA News* (2024) menyatakan bahwa penyebaran bioskop terdapat di sekitar 115 kota / kabupaten di Indonesia dengan 517 lokasi bioskop dan 2.145 jumlah layar. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menuturkan keberhasilan industri perfilman Indonesia mencapai hingga 55 juta penonton bioskop di sepanjang tahun 2023.

Selain bioskop, layanan *streaming* yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat pun memperlihatkan kapitalisasi perfilman yang terjadi di Indonesia. Ketertarikan masyarakat Indonesia pada industri perfilman mendorong layanan *streaming* film untuk menjamur di negara ini, seperti Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar, dan sebagainya. Dalam artikel detikinet (2023), The Trade Desk mencatat bahwa pada tahun 2022, jumlah pengguna layanan *streaming* di Indonesia mencapai 83 juta, membuat Indonesia menjadi negara yang menggunakan layanan *streaming* terbanyak di Asia Tenggara. Layanan *streaming* menawarkan kemudahan akses serta biaya yang relatif murah dengan banyaknya film yang disuguhkan sehingga menarik banyak orang dalam berlangganan. Bagi para pemilik modal, layanan *streaming* menghabiskan biaya yang lebih rendah dengan penjualan yang lebih tinggi sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal.

2.3 Film *Like & Share* (2022)



Gambar 2.1 Poster film *Like & Share* (2022)

Sumber: IMDb

Film *Like & Share* adalah film berdurasi 1 jam 52 menit yang dirilis di bioskop tanah air pada tahun 2022, kemudian dirilis di layanan *streaming* Netflix pada tanggal 27 April 2023. Film ini dibintangi oleh Arawinda Kirana, Aurora Ribero, Aulia Sarah, Jerome Kurnia, Kevin Julio, dan lainnya. *Like & Share* membahas tentang kasus kekerasan seksual pada perempuan dengan menonjolkan cerita seorang remaja yang

mengalami kekerasan seksual oleh pasangannya sendiri yang berusia jauh lebih tua dari dirinya. Film ini dibuat dengan harapan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran kekerasan seksual sekaligus mendorong masyarakat untuk mendampingi para penyintas.

Like & Share telah mendapatkan penghargaan yang sepadan dengan tampilan memukau yang dibawa oleh para aktor dan aktris, jalan cerita, visualisasi, dan unsur-unsur lainnya yang terdapat pada film. Film ini mendapatkan penghargaan dari dalam negeri yang memenangkan Festival Film Tempo (2022) dalam nominasi Skenario Pilihan Tempo, Piala Maya (2023) nominasi Desain Poster Terpilih, Festival Film Bandung (2023) nominasi Film Bioskop Terpuji dan Pemeran Utama Wanita Terpuji Film Bioskop, Festival Film Indonesia (2023) nominasi Penyunting Gambar Terbaik, Penata Suara Terbaik, dan Pengarah Artistik Terbaik, bahkan juga mampu bersaing di antara film-film asing dengan kemenangannya atas *Best Picture and Grand Prix* di OAFF (2023). Selain itu, film ini juga mencapai kesuksesan di bioskop tanah air dengan penjualan sebanyak 15.627 lembar tiket pada hari pertama tayang.

Hadirnya film *Like & Share* di bioskop dan layanan *streaming* menunjukkan bahwa film ini juga merupakan bagian dari kapitalisme. Selain mengedukasi masyarakat, film *Like & Share* juga berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari pasar industri film. Ciri khas Gina S. Noer sebagai pembuat film ditampilkan di sini, yakni digunakannya warna-warna yang cerah dalam film. Penggunaan warna yang *colorful* sengaja dipamerkan untuk menggambarkan aktualitas kehidupan remaja yang ceria dan semangat sambil menjadi *eye pleasing* untuk menarik perhatian masyarakat secara keseluruhan.

Film yang merupakan bagian dari media massa bermanfaat sebagai sarana untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat secara luas. Pesan yang disampaikan umumnya mencerminkan realitas terkait apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Film-film yang menceritakan isu-isu sosial ini dibuat tidak hanya sebagai sarana

informasi, edukasi, dan hiburan, tetapi juga tentunya untuk kebutuhan pendapatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa industri perfilman merupakan objek dari kapitalisme.

Melihat lekatnya seseorang dengan isu-isu sosial mendorong industri perfilman untuk bersaing dalam membuat film dengan kisah yang menggambarkan kehidupan masyarakat secara nyata demi mencapai jumlah penonton yang banyak. Salah satu isu sosial yang hangat diperbincangkan adalah isu tentang perempuan dan kekerasan seksual. Film *Like & Share* kemudian mengangkat topik tersebut yang tidak sekadar menyebarkan pesan mengenai pentingnya kesadaran kekerasan seksual, tetapi juga untuk meraih jumlah penonton dan pendapatan sebanyak-banyaknya.

2.4 Gerakan Feminisme di Indonesia

Saat ini, perempuan memiliki kehidupan yang lebih layak dengan kebebasan untuk memilih bagaimana mereka ingin menjalankan hidupnya. Perempuan terlihat aktif menjalankan kegiatan yang memang mereka ingin lakukan di berbagai bidang, seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Meskipun masih terdapat banyak hambatan yang dialami oleh perempuan sekarang, feminisme telah berkembang jauh lebih baik daripada apa yang dirasakan oleh perempuan dahulu kala. Kebebasan yang dirasakan oleh perempuan di masa kini tidak dapat melupakan perjuangan para perempuan terlebih dahulu yang telah berjerih payah menantang patriarki di masanya.

Istilah feminisme berasal dari kata Bahasa Latin “*femina*” yang berarti “wanita”. Istilah ini pertama kali digunakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan isu kesetaraan dan gerakan hak-hak perempuan. Pengertian dari feminisme adalah sebuah gerakan yang percaya sepenuhnya akan kesetaraan gender pada segala bidang, baik itu ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Feminisme menekankan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dalam setiap aspek hidupnya sehingga mereka mempunyai kesempatan dan akses pada sumber daya yang sama dengan laki-laki di masyarakat (Raina, 2017).

Gerakan feminisme berasal dari negara-negara di Barat yang muncul sebagai tanggapan perempuan dalam membatasi hak-hak mereka. Namun, gerakan ini telah

menyebar secara luas hingga ke seluruh dunia. Di Indonesia, tokoh feminisme yang paling terkenal dan disanjung sejak lama adalah R. A. Kartini. Ia dianggap sebagai simbol dari feminisme di Indonesia karena telah berjuang terhadap emansipasi perempuan serta berpengaruh besar bagi seluruh perempuan di Indonesia.

Perjuangan para perempuan di Indonesia dalam mendapatkan hak-haknya diketahui telah melewati berbagai rintangan yang sulit. Di masyarakat yang masih kental akan ideologi patriarki, tentu tidak semua orang setuju dalam mendukung gerakan feminisme ini. Gerakan feminisme telah lahir lama di Indonesia yang berfokus untuk memperjuangkan perempuan dengan masing-masing topik dan isu yang berbeda di setiap periodenya.

Pada awal mula perjuangannya, para perempuan di Indonesia mencoba berkumpul dan berkegiatan di dalam kelompok-kelompok yang beranggotakan laki-laki. Arivia & Subono (2017) menjelaskan tentang perempuan yang mengikuti keanggotaan umumnya bergabung dengan kelompok-kelompok bernuansa kedaerahan, seperti *Jong Java*, *Jong Ambon*, dan *Jong Sumatera*. Keterlibatan perempuan tersebut membawa mereka ke ranah publik hingga kemudian didirikan organisasi bernama Putri Mardika pada tahun 1912 sebagai organisasi perempuan pertama yang bergaris nasionalis di Indonesia. Kemudian, terdapat organisasi Aisyiyah pada tahun 1920 yang berlatarbelakang Islam dari organisasi Muhammadiyah. Di masa Hindia Belanda, banyak juga perempuan yang memberikan resolusi ke pemerintah kolonial agar perempuan mempunyai hak memilih dan hak dipilih. Resolusi tersebut dikabulkan oleh pemerintah dengan diberikannya kursi untuk wakil perempuan Indonesia di *Gemeenteraad* (sekarang DPRD Tingkat II).

Pada tanggal 22 – 25 Desember 1928, diselenggarakan Kongres Perempuan Pertama oleh beberapa organisasi perempuan yang mengangkat isu-isu perempuan dengan tiga fokus, yaitu perkawinan, poligami, dan akses terhadap pendidikan. Namun, seluruh organisasi perempuan terpaksa mundur saat Jepang mulai berkuasa di Indonesia karena Pemerintahan Jepang melarang semua organisasi perempuan untuk beroperasi. Pemerintahan Jepang hanya memberikan izin kepada *Fujinkai* sebagai

organisasi perempuan yang ingin mengedukasi tentang buta huruf, menjalankan kegiatan di dapur, dan pekerjaan sosial.

Di Minangkabau, Sumatera Barat, terdapat wartawan perempuan pertama bernama Roehana Kudus yang berani melawan diskriminasi terhadap perempuan. Pada tahun 1911, ia membangun Sekolah Kerajinan Amai Setia yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan secara ekonomi. Kemudian di tahun 1912, ia mengelola surat kabar Soenting Melajou yang dianggap revolusioner karena mampu membahas tentang isu-isu yang tidak awam pada masanya, seperti poligami, pendidikan untuk perempuan, masalah adat bagi perempuan, dan lain-lain.

Nama pahlawan R. A. Kartini tentunya tidak bisa dilepaskan dari gerakan perempuan di Indonesia. Bukunya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang menceritakan tentang persoalan tradisi yang mengikat perempuan sehingga menjadi tidak berdaya dan bergantung pada laki-laki. Banyak perempuan yang terinspirasi berkat buku tersebut untuk berjuang demi kesetaraan dengan laki-laki atau disebut dengan “emansipasi perempuan”. Gagasan-gagasan utama oleh Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan menyangkut tentang pendidikan, pekerjaan, dan penghapusan poligini.

Gerakan feminisme di Indonesia yang sangat progresif dan kuat adalah Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang berjalan dari tahun 1940-an – 1965. Gerakan ini awalnya bernama Gerakan Wanita Sedar (Gerwis) yang berdiri pada tahun 1950 dengan beranggotakan perempuan yang berpendidikan tinggi serta kesadaran politik yang maju. Kemudian, Gerwis memperluas keanggotaannya dengan melibatkan perempuan dari kalangan akar rumput. Organisasi ini berhasil berpartisipasi pada kegiatan politik yang berkampanye dalam pemilihan parlemen sehingga mendapatkan empat kursi di Pemilu 1955. Namun, Peristiwa Gerakan 30 September 1965 di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto membuat organisasi ini menjadi hancur. Saat ini juga muncul organisasi perempuan baru, yaitu Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tetapi tidak dapat dikatakan sebagai bagian

dari feminisme karena organisasi-organisasi tersebut dikelola oleh pemerintah berdasarkan pada kekuasaan negara yang didominasi oleh laki-laki.

Berlanjut setelah turunnya Presiden Soeharto di era reformasi, muncul banyak organisasi perempuan yang sangat peduli dan semakin memperjuangkan hak-hak perempuan. Para perempuan juga sadar betapa lebarnya jarak antara mereka yang berada di golongan atas dengan golongan bawah. Di era inilah lahir Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 1998. Hingga kini, organisasi-organisasi perempuan pun terus menonjolkan permasalahan yang ada di masyarakat serta turut berkampanye untuk melawan pembatasan hak-hak perempuan.

Gerakan feminisme tidak dapat dipungkiri telah membuka ruang yang luas untuk berdiskusi dan menyebarkan suara perempuan yang merasa terbelenggu atas tertindasnya kaum mereka selama ini. Perkembangan gerakan feminisme dapat dilihat dari bagaimana perempuan semakin bebas untuk berekspresi di depan publik. Di ranah politik misalnya, terdapat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan syarat keterwakilan perempuan sebanyak 30% di partai politik (parpol). Selain itu, terdapat juga UU TPKS No. 12 Tahun 2022 yang disahkan pada tanggal 9 Mei 2022 lalu. Terlebih dengan adanya media sosial yang mempermudah masyarakat untuk berperan aktif dalam membicarakan tentang isu-isu perempuan secara bebas. Melalui media sosial, perempuan memiliki kebebasan untuk bersuara dengan kampanye-kampanye yang menghidupkan perjuangan hak-hak mereka yang dapat menjangkau lebih banyak orang terutama bagi generasi muda. Meskipun begitu, gerakan feminisme masih saja menerima banyak penolakan yang datang dari masyarakat.

Indonesia yang merupakan negara dengan ideologi patriarki yang masih erat di masyarakatnya tentu dinilai sulit untuk menjalankan gerakan feminisme bagi seluruh warganya. Banyak orang yang belum sepenuhnya paham akan arti dari feminisme itu sendiri dan mengira bahwa gerakan ini adalah suatu kegiatan yang merendahkan salah satu gender dan meninggikan gender lain. Padahal, perempuan hanya menginginkan

kesetaraan hak dengan laki-laki di masyarakat. Meskipun gerakan feminisme telah bangkit di era reformasi, bukan berarti perjuangan perempuan sudah selesai. Permasalahan yang dihadapi oleh perempuan sekarang justru semakin banyak dan kompleks.

Kampanye yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, yaitu Women's March, pertama kali diadakan pada tahun 2017. Kampanye ini berlangsung setiap tahunnya untuk mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan dengan berfokus pada kebijakan-kebijakan yang perlu disahkan dan diterapkan, seperti pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Namun, pada tahun 2019, terdapat sebagian masyarakat yang menolak gerakan feminisme ini. Penolakan ditunjukkan dengan membuat kampanye berjudul "Indonesia Tanpa Feminis" yang dinilai cukup menohok bagi kaum perempuan yang selama ini telah berjuang untuk mendapatkan hak-haknya. Kampanye tersebut disebarluaskan di media sosial, khususnya Instagram, yang menuai kontroversi berkat tagar #IndonesiaTanpaFeminis dan #UninstallFeminism. Masyarakat yang mendukung kampanye ini umumnya mengaitkan feminisme dengan ajaran Islam yang dinilai tidak sejalan. Banyak dari mereka yang melawan gerakan feminisme dengan pernyataan bahwa tubuh kita bukan milik kita, melainkan milik Allah SWT (Masfupah, 2019). Perlawanan tersebut kemudian ditepis oleh Lies Marcoes, seorang peneliti serta alumni dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dalam wawancaranya bersama VOA (2019) menyatakan bahwa siapapun dapat menyampaikan pendapat, asalkan mereka mengerti apa yang ditolak. Ia juga mengatakan bahwa agama perlu dipelajari dengan kesadaran kritis karena jika tidak, maka dapat menindas kaum yang dilemahkan secara struktur.

Sementara itu, di bidang politik, terlihat keterwakilan perempuan yang masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun telah terdapat UU No. 7 Tahun 2017 yang mewajibkan 30% keterwakilan perempuan di masing-masing parpol, nyatanya, terlihat masih sedikit perempuan yang terlibat di bidang ini. Hasil Pemilu 2019 mencatat bahwa keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya mencapai angka 20,8% atau 120 anggota legislatif perempuan saja dari 575

anggota (MPR, 2023). Kejadian ini masih berlanjut hingga ke Pemilu 2024 lalu yang menunjukkan bahwa hampir semua parpol tidak memenuhi syarat minimum adanya keterwakilan 30% perempuan yang dilihat dari sebanyak 84 daerah pemilihan anggota DPR dan 18 parpol (VOA, 2023). Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyetujui daftar pencalonan ini seharusnya tidak menerima parpol-parpol yang memiliki keterwakilan perempuan kurang dari 30%. Keberlanjutan pelanggaran ini memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana UU tersebut dibuat seakan-akan hanya untuk memuaskan kaum perempuan. Padahal, dengan adanya partisipasi perempuan di bidang politik yang setara dengan laki-laki, kualitas politik di Indonesia dapat meningkat karena adanya suara yang beragam dari berbagai kalangan yang dapat mewakili masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, isu yang masih menjadi hambatan bagi gerakan feminisme untuk dilawan, adalah isu kekerasan yang dialami oleh perempuan hingga saat ini. Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu kasus yang penting untuk dipahami bagi semua orang karena sangat merugikan mereka yang mengalaminya. Sayangnya, kekerasan pada perempuan telah berakar dan sulit untuk ditumbangkan sejak dahulu kala. Terlebih pada kasus kekerasan seksual yang mendominasi kasus kekerasan lainnya melihat dari banyaknya pengaduan yang dicatat oleh Komnas Perempuan untuk kasus tersebut. Kasus kekerasan seksual masuk pada ranah personal yang pelakunya cenderung dilakukan oleh orang terdekat korban, seperti mantan pacar, pacar, dan suami. Mirisnya, tidak jarang juga terdengar banyaknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga sendiri, seperti paman, kakek, hingga ayah korban.

Meninjau dari diskriminasi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kepada perempuan, pemerintah masih berusaha mengatur kebijakan yang membela posisi perempuan di masyarakat. KemenPPPA telah diberikan kewenangan dari yang sebelumnya sebatas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan saja, sekarang dapat menjadi pelaksana implementasi. Kemudian, siaran pers yang disebarkan oleh KemenPPPA (2023) juga membahas tentang arahan Presiden Joko Widodo mengenai lima isu prioritas untuk diselesaikan dalam periode 2020 – 2024, yakni 1) Pemberdayaan

perempuan dalam kewirausahaan yang berspektif gender, 2) Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan / pengasuhan anak, 3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, 4) Penurunan pekerja anak, dan 5) Pencegahan perkawinan anak.

2.5 Feminisme dalam Industri Perfilman

Pada sejarahnya, perempuan dalam industri perfilman senantiasa memerankan karakter yang menyudutkan pihak perempuan dan memuaskan pihak laki-laki. Kelompok yang berkuasa di Indonesia secara sengaja maupun tidak telah mewujudkan eksistensi eksploitasi perempuan dengan menganut ideologi patriarki di film-film yang dibuatnya. Sejak dahulu kala, industri perfilman membuat perempuan kerap digambarkan sebagai kaum yang tertindas sehingga mereka terpaksa berperan layaknya objek yang memamerkan tubuhnya saja. Jika dibandingkan, laki-laki cenderung memiliki karakter yang aktif, sedangkan perempuan hanya sebagai karakter yang pasif. Peran perempuan di industri perfilman juga kerap terbatas di ranah domestik, seperti seorang ibu rumah tangga atau pembantu. Selain itu, penggambaran perempuan juga sering kali diperlihatkan sebagai sosok yang lemah, emosional, dan tidak berdaya tanpa laki-laki. Persoalan demikian membuat dampak yang negatif terhadap citra perempuan.

Industri perfilman terlihat seakan-akan menciptakan fantasi yang liar hanya untuk kaum laki-laki. Film pun tidak lagi berlaku sebagai cerminan realitas melainkan dibuat untuk kepentingan kaum laki-laki saja (Iswahyuningtyas, 2009). Di Indonesia, kondisi ini dialami oleh banyak aktris perempuan yang menampilkan adegan-adegan sensual di berbagai film, seperti Julia Perez, Meriam Bellina, Tamara Bleszynski, dan masih banyak lagi (Irawan, 2014). Dalam industri perfilman, perempuan seolah-olah memiliki peran tidak lebih dari fungsi komersial yang dapat menarik banyak penonton sehingga pendapatan film yang ada akan melambung tinggi.

Kendati sejarah dari industri perfilman yang diketahui tidak begitu memihak kepada perempuan, sejak gerakan feminisme hadir, industri tersebut telah mengalami pergeseran ke arah yang lebih baik. Industri perfilman sudah mengalami perubahan

secara bertahap dari waktu ke waktu. Film pun dipahami dapat mengubah sudut pandang masyarakat sehingga pada konteks ini, film dimanfaatkan untuk mengubah stereotipe perempuan. Saat ini, banyak film yang telah mengangkat perempuan sebagai pemeran utama sehingga mereka tidak lagi berada di bawah bayangan laki-laki.

Industri perfilman kian beranjak menjadi bagian dari gerakan feminisme. Film sebagai fungsinya yang merupakan edukasi untuk masyarakat dapat melawan stigma negatif bagi perempuan sehingga selaras dengan harapan kesetaraan yang selama ini diinginkan. Lantas, film juga memerlukan keterlibatan perempuan secara langsung dalam pembuatannya agar mereka dapat mengendalikan bagaimana citra perempuan digambarkan sehingga membentuk pikiran kepada masyarakat bahwa perempuan merupakan kaum yang memiliki identitas dan haknya sendiri. Isu yang banyak diceritakan di film-film yang memperjuangkan perempuan ini tidak lain adalah isu mengenai kekerasan seksual. Hal tersebut sejalan dengan topik pada penelitian ini yang membahas tentang para perempuan sebagai penyintas kekerasan seksual dalam film *Like & Share*.

Film *Like & Share* menceritakan tentang perempuan yang mengalami kekerasan seksual; mereka berusaha bangkit dan belajar untuk menjalankan hidup secara normal setelah kasus traumatis yang harus dialaminya. Film ini juga memperlihatkan masyarakat dengan ideologi patriarki yang masih menyalahkan perempuan ketika mereka mengalami kekerasan seksual. Selanjutnya, ditunjukkan pula hukum di Indonesia yang masih cacat; mengutamakan orang yang berkuasa dan tidak berpihak kepada korban. Selain itu, *Like & Share* juga membawa penulis dan sutradara perempuan, yaitu Gina S. Noer, yang terkenal gemar membuat film tentang isu-isu perempuan. Ia menginginkan film ini untuk bisa mengedukasi masyarakat atas kesadaran yang tinggi terhadap kasus kekerasan seksual serta mendampingi para korban atau penyintasnya. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa para korban atau penyintas kekerasan seksual juga merupakan manusia yang utuh dan memiliki kebebasan dalam memutuskan kehidupannya sendiri.